

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Apotek di Apotek Rafa Farma adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) perlu meningkatkan pengetahuan kefarmasian dan kemampuan berkomunikasi serta kepercayaan diri agar dapat memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan benar, jelas, dan mudah dipahami.
2. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) perlu mempelajari dan memahami peraturan perundang – undangan yang terbaru terkait farmasi khususnya di bidang apotek agar dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.
3. Apotek sebaiknya melakukan pendokumentasian Patient Medication Record (PMR) secara lengkap agar dapat diketahui riwayat pengobatan dan perkembangan pasien.
4. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) harus bisa lebih aktif dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek sehingga bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola dan mengembangkan apotek secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- American Diabetes Association (ADA), 2018, *Standarts of Medical Care in Diabetes-2018*. American Diabetes Association, USA.
- Anief, M. 2005, *Manajemen Farmasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Blenkinsopp, A., Paxton, P., and Blenkinsopp, J., 2009, *Symptoms in the Pharmacy A Guide to the Management of Common Illness*, 5th Ed. John Wiley and Sons, USA.
- BPOM, 2008, *Informatorium Obat Nasional Indonesia*, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Farmalkes, 2012 diakses pada tanggal 5 Mei, 2020 <http://farmalkes.kemkes.go.id/2012/08/obat-generik/>
- IAI, 2012, *Kumpulan Peraturan Perundangan Kefarmasian*, Surabaya.
- Joint Formulary Committee, 2019. *British National Formulary*, 78th Ed. BMJ Group and Pharmaceutical Press, London.
- Joint Formulary Committee, 2019. *British National Formulary for Children*. BMJ Group and Pharmaceutical Press, London.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176 Tahun 1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, *Drug Information Handbook*, 17th Ed. American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Medscape, 2020, Medscape Reference, Aplikasi Medscape.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan*

Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016*

tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1993. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- MIMS, 2020, MIMS Reference, Aplikasi MIMS.
- Mycek, M. J, Harvey, R.A. dan Champe, P.C., 2001, *Farmakologi Ulasan Bergambar*, 2nd Ed. H. Hartanto, ed., Jakarta, Widya Medika.
- Okamoto, T., Yoshiyama, H., Nakazawa, T., Park, I.D., Chang, M.W., Yanai, H., Okita, K., Shirai, M. 2012, A change in PBP1 is involved in amoxicillin resistance of clinical isolates of *Helicobacter pylori*, *J Antimicrob Chemother*, **50**(6):56-849.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor.
- Presiden Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 1997. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Rahayuda, I Gede Surya, 2016, Identifikasi Jenis Obat Berdasarkan Gambar Logo Pada Kemasan Menggunakan Metode Naive Bayes, *Jurnal Sisfo*, **6**(1):17-32.
- Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2012, *Manajemen Farmasi*, Ed. 3, Airlangga University Press, Surabaya.
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6355/DirJend/S.K./69.
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2380/A/SK/VI/1983 tentang Tanda Khusus untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas.
- Sweetman, S.C., 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference* 36th Ed. Pharmaceutical Press, London.
- Wang, D., Zhang, H., Lang, F., Yun, C.C. 2007, Acute activation of NHE3 by dexamethasone correlates with activation of SGK1 and requires a functional glucocorticoid receptor, *American Journal Physiology*, **292**(1): 396-404.